

**DAFTAR ISIAN  
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN**

Desa: PASIR BELENGKONG  
Kecamatan: Paser Belengkong  
Kabupaten: KAB. PASER  
Provinsi: KALIMANTAN TIMUR  
Bulan: 12  
Tahun: 2022

Nama Pengisi: RISA APRIYANTI, S.I.KOM  
Pekerjaan: Petugas Profil Desa  
Jabatan: STAFF KAUR PERRENCANAAN  
Kepala Desa / Lurah: MUHAMMAD SUBHAN, SE.,MH  
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN  
UNTUK MENGGISI PROFIL  
DESA/KELURAHAN  
Referensi 1 :  
Referensi 2:  
Referensi 3:  
Referensi 4:

**I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**

**A. Jumlah Penduduk**

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	1779 orang	1783 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	1775 orang	1780 orang
Persentase perkembangan	0.23 %	0.17 %

**B. Jumlah Keluarga**

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	1037 KK	120 KK	1157 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	1033 KK	121 KK	1154 KK
Prosentase Perkembangan	0.39 %	-0.83 %	

**II. EKONOMI MASYARAKAT**

**A. Pengangguran**

1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	1516 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	319 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	627 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	56 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	52 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	2 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	1 orang

**B. Kesejahteraan Keluarga**

1. Jumlah keluarga prasejahtera	89 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	100 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	229 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	25 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	13 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	456 keluarga

**III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO**

**A. SUBSEKTOR PERTANIAN**

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)

**B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN**

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
<b>C. SUBSEKTOR PETERNAKAN</b>							
Jenis Produksi	Hasil Produksi	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Jumlah Ternak (Ekor)		
<b>D. SUBSEKTOR PERIKANAN</b>							
Jenis Produksi	Hasil Produksi (Ton/Tahun)	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Total biaya antara yang dihabiskan (Rp)	Jenis usaha perikanan	
<b>E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN</b>							
Total nilai produksi tahun ini						Rp. 151.654.954,00	
Total nilai bahan baku yang digunakan						Rp. 82.522.456,00	
Total nilai bahan penolong yang digunakan						Rp. 86.543.008,00	
Total biaya antara yang dihabiskan						Rp. 50.875.459,00	
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada						3 jenis	
<b>F. SUBSEKTOR KERAJINAN</b>							
Total nilai produksi tahun ini						Rp. 50.000.000,00	
Total nilai bahan baku yang digunakan						Rp. 35.000.000,00	
Total nilai bahan penolong yang digunakan						Rp. 5.000.000,00	
Total biaya antara yang dihabiskan						Rp. 2.500.000,00	
Total jenis kerajinan rumah tangga						15 jenis	
<b>G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN</b>							
<b>G.1. Subsektor Industri Pangan</b>							
Total nilai produksi tahun ini						Rp. 25.000.000,00	
Total nilai bahan baku yang digunakan						Rp. 15.000.000,00	
Total nilai bahan penolong yang digunakan						Rp. 5.000.000,00	
Total biaya antara yang dihabiskan						Rp. 1.500.000,00	
Total jumlah jenis industri tsb yang ada						2 jenis	
<b>H. SUBSEKTOR KEHUTANAN</b>							
Total nilai produksi tahun ini						Rp. 36.885.965,00	
Total nilai bahan baku yang digunakan						Rp. 20.765.438,00	
Total nilai bahan penolong yang digunakan						Rp. 20.008.754,00	
Total biaya antara yang dihabiskan						Rp. 15.099.843,00	
<b>I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN</b>							
<b>I.1. Subsektor Perdagangan Besar</b>							
Total nilai transaksi						Rp. 75.000.000,00	
Total nilai aset perdagangan yang ada						Rp. 50.000.000,00	
Total jumlah jenis perdagangan besar						Rp. 2,00	
Total nilai biaya yang dikeluarkan						Rp. 25.000.000,00	
Total biaya antara lainnya						Rp. 10.000.000,00	
<b>I.2. Subsektor Perdagangan Eceran</b>							
Jumlah total jenis perdagangan eceran						15 jenis	
Total nilai transaksi						Rp. 35.000.000,00	
Total nilai biaya yang dikeluarkan						Rp. 17.500.000,00	
Total nilai aset perdagangan eceran						Rp. 15.000.000,00	
<b>I.3. Subsektor Hotel</b>							
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada						1 jenis	
Jumlah total pendapatan						Rp. 1.000.000,00	
Jumlah total biaya pemeliharaan						Rp. 500.000,00	

Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 1.000.000,00
Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. 1.500.000,00
<b>I.4. Subsektor Restoran</b>	
Jumlah tempat penyediaan konsumsi	2 Unit
Biaya konsumsi yang dikeluarkan	Rp. 64.000.235,00
Biaya antara lainnya	Rp. 23.088.804,00
Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. 54.098.372,00
<b>J. Sektor Bangunan/Konstruksi</b>	
Jumlah bangunan yang ada tahun ini	5 unit
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan	Rp. 150.000.000,00
Total nilai bangunan yang ada	Rp. 2.500.000.000,00
Biaya antara lainnya	Rp. 25.000.000,00
<b>K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan</b>	
<b>K.1. Subsektor Bank</b>	
Jumlah transaksi perbankan	Rp. 12.000.000,00
Jumlah nilai transaksi perbankan	Rp. 12.000.000,00
Jumlah biaya yang dikeluarkan	Rp. 5.000.000,00
<b>K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank</b>	
Jumlah lembaga keuangan bukan bank	2500000 Unit
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank	3000000 Jenis
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank	Rp. 5.000.000,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 1.000.000,00
<b>K.3. Subsektor Sewa Bangunan</b>	
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah	3200000 unit
Total nilai persewaan yang dicapai	Rp. 2.000.000,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 1.000.000,00
Biaya lainnya	Rp. 1.200.000,00
<b>K.4. Subsektor Jasa Perusahaan</b>	
Jumlah perusahaan jasa	4000000 Jenis
Nilai transaksi perusahaan jasa	Rp. 1.204.208,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 2.399.881,00
Biaya lainnya	Rp. 3.000.000,00
<b>L. SEKTOR JASA-JASA</b>	
<b>L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum</b>	
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	15 unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	Rp. 7.500.000,00
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan	Rp. 7.000.000,00
<b>L.2. Subsektor jasa swasta</b>	
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat	1 jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial	Rp. 5.226.783,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 1.209.269,00
<b>L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi</b>	
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi	1 jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi	Rp. 3.500.000,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 3.000.000,00
<b>L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga</b>	
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	5 jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp. 1.000.000,00
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp. 4.500.000,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 4.000.000,00
<b>M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	

<b>M.1. Subsektor Angkutan</b>	
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan	2 Jenis
Jumlah total kendaraan angkutan	2 Unit
Nilai total transaksi pengangkutan	Rp 2,00
Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp 25.000.000,00
<b>N. SEKTOR LISTRIK, GAS &amp; AIR MINUM</b>	
<b>N.1. Subsektor Listrik</b>	
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik	2 Jenis
Jumlah nilai produksi listrik	Rp 30.549.754,00
Jumlah total nilai transaksi	Rp 25.087.575,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp 24.009.865,00
<b>N.2. Subsektor Gas</b>	
Jumlah kegiatan penyediaan gas	5 jenis
Nilai aset produksi gas	Rp 50.050.005,00
Nilai transaksi	Rp 25.000.035,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 21.000.010,00
<b>N.3. Subsektor Air Minum</b>	
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum	4 jenis
Nilai aset penyediaan air minum	Rp 100.000.000,00
Nilai produksi air minum	Rp 90.000.000,00
Nilai transaksi air minum	Rp 90.000.000,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 90.000.000,00
<b>IV. PENDAPATAN PERKAPITA</b>	
<b>A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha</b>	
<b>A.1. Pertanian</b>	
1. Jumlah rumah tangga	268 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	281 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	13 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	13 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 50.000.000,00
<b>A.2. Peternakan</b>	
1. Jumlah rumah tangga	56 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	61 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	11 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	14 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 49.000.000,00
<b>A.3. Perikanan</b>	
1. Jumlah rumah tangga	11 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	21 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	12 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	9 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 10.000.000,00
<b>A.4. Kerajinan</b>	
1. Jumlah rumah tangga	27 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	90 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	31 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	21 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 42.000.000,00
<b>A.5. Pertambangan</b>	
1. Jumlah rumah tangga	11 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	21 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	11 Keluarga

4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	12 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 15.300.000,00
<b>A.6. Kehutanan</b>	
1. Jumlah rumah tangga	10 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	14 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	12 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	11 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 15.099.843,00
<b>A.7. Industri kecil, menengah dan besar</b>	
1. Jumlah rumah tangga	10 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	35 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	10 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	20 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 115.000.000,00
<b>A.8. Jasa dan perdagangan</b>	
1. Jumlah rumah tangga	23 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	52 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	28 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	12 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 30.000.000,00
<b>B. PENDAPATAN RILL KELUARGA</b>	
Jumlah Kepala Keluarga	796 KK
Jumlah Anggota Keluarga	2687 orang
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga	Rp 1.341.567,00
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp 1.341.567,00
<b>V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR</b>	
<b>1. Sektor Pertanian</b>	
Petani	268 orang
Buruh Tani	13 orang
Pemilik Usaha Tani	25 orang
<b>2. Sektor Perkebunan</b>	
Karyawan Perusahaan Perkebunan	76 orang
Buruh perkebunan	48 orang
Pemilik usaha Perkebunan	7 orang
<b>3. Sektor Peternakan</b>	
Peternakan Perorangan	56 orang
Buruh Usaha Peternakan	11 orang
Pemilik Usaha Peternakan	6 orang
<b>4. Sektor Perikanan</b>	
Nelayan	35 orang
Buruh Usaha Perikanan	31 orang
Pemilik Usaha Perikanan	3 orang
<b>5. Sektor Kehutanan</b>	
Pengumpul Hasil Hutan	3 orang
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan	7 orang
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan	5 orang
<b>6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C</b>	
Penambang Galian C Perorangan	2 orang
Buruh Usaha Pertambangan	25 orang
Pemilik Usaha Pertambangan	2 orang
<b>7. Sektor Industri Kecil &amp; Kerajinan Rumah Tangga</b>	

<b>8. Sektor Industri Menengah dan Besar</b>	
Pemilik perusahaan	5 orang
<b>9. Sektor Perdagangan</b>	
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	38 orang
Buruh Perdagangan Hasil Bumi	12 orang
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	2 orang
<b>10. Sektor Jasa</b>	
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	4 orang
Pemilik usaha informasi dan komunikasi	0 orang
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	6 orang
Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata	10 orang
Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	21 orang
Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya	1 orang
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	15 orang
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	57 orang
TNI	10 orang
POLRI	10 orang
Dokter swasta	0 orang
Bidan swasta	0 orang
Dosen swasta	0 orang
Guru swasta	10 orang
Pensiunan TNI/POLRI	32 orang
Pensiunan swasta	47 orang
Pengacara	0 orang
Notaris	0 orang
Jasa Konsultansi Manajemen dan Teknis	0 orang
Seniman/artis	0 orang
Sopir	14 orang
Buruh migran perempuan	0 orang
Buruh migran laki-laki	0 orang
Usaha jasa pengerah tenaga kerja	0 orang
Wiraswasta lainnya	67 orang
Tidak mempunyai matapencaharian tetap	78 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta	12 orang

## VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

<b>A. ASET TANAH</b>	
Tidak memiliki tanah	66 orang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha	97 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha	3 orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha	2 orang
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha	20 orang
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha	4 orang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha	0 orang
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha	0 orang
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha	0 orang
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha	4 orang
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha	11 orang
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha	2 orang
Memiliki tanah lebih dari 10 ha	0 orang
Jumlah total penduduk	434 orang
<b>B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM</b>	
Memiliki ojek	0 orang- 0 unit
Memiliki becak	3 orang- 3 unit
Memiliki cidemo/andong/dokar	0 orang- 0 unit
Memiliki helikopter dan atau pesawat	0 orang- 0 unit
<b>C. ASET SARANA PRODUKSI</b>	
Memiliki penggilingan padi	1 orang

Memiliki traktor	15 orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	0 orang
Memiliki kapal penangkap ikan	20 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan	1 orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan	1 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan	1 orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan	3 orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil pertambangan	1 orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil pariwisata	1 orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri jasa perdagangan	1 orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah	8 orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas	54 orang

**D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING**

Tembok	48 rumah
Kayu	311 rumah

**RUMAH MENURUT LANTAI**

Keramik	46 rumah
Semen	33 rumah
Kayu	262 rumah
Tanah	9 rumah

**RUMAH MENURUT ATAP**

Genteng	5 rumah
Seng	294 rumah
Asbes	31 rumah
Kayu	9 rumah
Daun lontar/gebang/enau	7 rumah
Daun ilalang	1 rumah

**VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA**

Jumlah keluarga memiliki perahu bermotor	48 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki kapal barang	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki kapal pesiar	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki helikopter	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki pesawat terbang	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki ternak besar	1 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki ternak kecil	10 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki hiasan emas/berlian	178 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki buku tabungan bank	349 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat deposito	30 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat bangunan	457 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri besar	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri menengah	11 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri kecil	34 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha perikanan	13 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha peternakan	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha perkebunan	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha pasar swalayan	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar tradisional	1 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar desa	50 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha transportasi/pengangkutan	5 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki aset telekomunikasi	0 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki saham di perusahaan	0 Keluarga

**VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT****A. Tingkat Pendidikan Penduduk**

Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	53 orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	14 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	34 orang
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	310 orang
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	714 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	172 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	24 orang

Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	341 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	263 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	76 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	474 orang
Jumlah penduduk sedang D-1	1 orang
Jumlah penduduk tamat D-1	2 orang
Jumlah penduduk sedang D-2	4 orang
Jumlah penduduk tamat D-2	16 orang
Jumlah penduduk sedang D-3	7 orang
Jumlah penduduk tamat D-3	29 orang
Jumlah penduduk sedang S-1	20 orang
Jumlah penduduk tamat S-1	72 orang
Jumlah penduduk sedang S-2	1 orang
Jumlah penduduk tamat S-2	6 orang
Jumlah penduduk tamat S-3	1 orang
Jumlah penduduk sedang SLB A	1 orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	1 orang
Jumlah penduduk sedang SLB B	2 orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	1 orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	1 orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	12 orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	3 orang

**B. Wajib belajar 9 tahun**

1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	597 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	597 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	0 orang

**C. Rasio Guru dan Murid**

1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak	14 orang
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak	85 orang
3. Jumlah guru SD dan sederajat	23 orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	269 orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	56 orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	148 orang
7. Jumlah guru SLTA/ sederajat	38 orang
8. Jumlah siswa SLTA/ sederajat	348 orang
9. Jumlah siswa SLB	4 orang
10. Jumlah guru SLB	1 orang

**D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat**

Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan	1 unit
Jumlah taman bacaan desa/ kelurahan	1 unit
Jumlah perpustakaan keliling	1 unit
Jumlah sanggar belajar	2 unit
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah	5 kegiatan
Jumlah kelompok belajar Paket A	10 kelompok
Jumlah peserta ujian Paket A	25 orang
Jumlah kelompok belajar Paket B	15 kelompok
Jumlah Peserta ujian Paket B	39 orang
Jumlah kelompok belajar Paket C	18 kelompok
Jumlah peserta ujian Paket C	60 orang
Jumlah lembaga kursus keterampilan	6 unit
Jumlah peserta kursus keterampilan	9 orang

**IX. KESEHATAN MASYARAKAT****A. Kualitas Ibu Hamil**

Jumlah ibu hamil	383 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	86 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	98 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	56 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	57 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	77 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	25 orang

Jumlah kematian ibu hamil	12 orang
Jumlah ibu hamil melahirkan	345 orang
Jumlah ibu nifas	343 orang
Jumlah kematian ibu nifas	13 orang
Jumlah ibu nifas hidup	330 orang
<b>B. Kualitas Bayi</b>	
Jumlah keguguran kandungan	24 orang
Jumlah bayi lahir	357 orang
Jumlah bayi lahir mati	12 orang
Jumlah bayi lahir hidup	345 orang
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	11 orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	14 orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	24 orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental	23 orang
<b>C. Kualitas Persalinan</b>	
<b>Tempat Persalinan</b>	
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	55 unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin	13 unit
Tempat persalinan Puskesmas	13 unit
Tempat persalinan Polindes	1 unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	1 unit
Tempat persalinan rumah praktek bidan	12 unit
Tempat praktek dokter	0 unit
Rumah dukun	5 unit
Rumah sendiri	127 unit
<b>Pertolongan Persalinan</b>	
Jumlah Persalinan ditolong Dokter	23 tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan	95 tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat	7 tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin	30 tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga	6 tindakan
<b>D. Cakupan Imunisasi</b>	
Jumlah Bayi usia 2 bulan	123 orang
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1	112 orang
Jumlah bayi usia 3 bulan	112 orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2	98 orang
Jumlah bayi usia 4 bulan	137 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3	87 orang
Jumlah bayi 9 bulan	87 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak	65 orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar	141 orang
<b>E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB</b>	
<b>Pasangan Usia Subur</b>	
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	80 orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun	236 orang
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	5 orang
Jumlah pasangan usia subur	212 pasangan
<b>Keluarga Berencana</b>	
Jumlah akseptor KB	383 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	89 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	89 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	13 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	144 orang
Jumlah pengguna metode vasektomi	0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi	0 orang
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	32 orang
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	12 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	4 orang
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	171 orang

<b>F. Wabah Penyakit</b>	
<b>Muntaber</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	15 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>Demam berdarah</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	12 kejadian
Jumlah yang meninggal	1 kejadian
<b>Kolera</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	1 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>Polio</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>Cikungunya</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	4 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>Flu burung</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>Busung lapar</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>Kelaparan</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>Ispa</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	11 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>G. Angka Harapan Hidup</b>	
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan	0,00 Tahun
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota	0,00 Tahun
Angka Harapan Hidup Provinsi	73,00 Tahun
Angka harapan Hidup Nasional	70,90 Tahun
<b>H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih</b>	
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	112 Keluarga
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM	228 Keluarga
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan	89 Keluarga
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	103 Keluarga
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran	65 Keluarga
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum	30 Keluarga
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai	78 Keluarga
8. Jumlah keluarga menggunakan embung	13 Keluarga
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air	3 Keluarga
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut	2 Keluarga
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas	1 Keluarga
Total jumlah keluarga	724 Keluarga
<b>I. Perilaku hidup bersih dan sehat</b>	
Kebiasaan buang air besar	
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat	459 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan	98 Keluarga
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan	67 Keluarga

Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum	34 Keluarga
<b>Pola makan</b>	
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali	Ada
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali	Ada
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali	Ada
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali	Ada
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali	Ada
<b>Kebiasaan berobat bila sakit</b>	
Dukun Terlatih	Sedikit
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu	Sedikit
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif	Sedikit
Paranormal	Tidak ada
Obat tradisional dari keluarga sendiri	Sedikit
Tidak diobati	Sedikit
<b>J. Status Gizi Balita</b>	
Jumlah Balita	170 orang
Jumlah Balita bergizi buruk	11 orang
Jumlah Balita bergizi baik	150 orang
Jumlah Balita bergizi kurang	9 orang
Jumlah Balita bergizi lebih	2 orang

**K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini**

Jenis penyakit	Jumlah penderita	Di rawat di
Stroke	5 orang	Rumah sakit
Diabetes Melitus	12 orang	Rumah sakit
Ginjal	5 orang	Rumah sakit
TBC	4 orang	Rumah sakit

**L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat**

Jumlah MCK Umum	5 unit
Jumlah Posyandu	3 unit
Jumlah kader Posyandu aktif	24 orang
Jumlah pembina Posyandu	12 orang
Jumlah Dasawisma	1 Dasawisma
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif	1 orang
Jumlah kader bina keluarga balita aktif	34 orang
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	1 orang
Buku rencana kegiatan Posyandu	Diisi
Buku data pengunjung Posyandu	Diisi
Buku kegiatan pelayanan Posyandu	Diisi
Buku administrasi Posyandu lainnya	21 jenis
Jumlah kegiatan Posyandu	13 jenis
Jumlah kader kesehatan lainnya	1 orang
Jumlah kegiatan pengobatan gratis	12 jenis
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN	12 jenis
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan	16 jenis
Lainnya	10 jenis

**X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN****A. Konflik SARA**

Kasus konflik pada tahun ini	0 kasus
Kasus konflik SARA pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga	0 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW	0 kasus
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli	0 kasus
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain	0 kasus
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 kasus
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	Rp 0,00
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 orang
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang

Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	0 orang
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 kasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 orang
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	Rp 0,00
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 buah
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 rumah
Jumlah korban luka akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah janda akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
<b>B. Perkelahian</b>	
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini	5 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material	0 kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	5 orang
<b>C. Pencurian</b>	
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini	32 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat	8 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat	1 kasus
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api	2 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	8 orang
<b>D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah</b>	
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat	0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
<b>E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan</b>	
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi	12 orang
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	2 orang
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan	0 orang
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang	3 orang
<b>F. Pemakaian Miras dan Narkoba</b>	
Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras	2 buah
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras	5 orang
Jumlah kasus mabuk akibat Miras	2 kasus
Jumlah pengedar Narkoba	1 orang
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	3 orang
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba	0 kasus
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba	0 kasus
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	3 orang
<b>G. Prostitusi</b>	
Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat	0 orang
Lokalisasi prostitusi	Tidak Ada
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)	0 buah
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	0 kasus
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi	0 kali
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	0 kali
<b>H. Pembunuhan</b>	
Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini	0 orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus bunuh diri	0 kasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum	0 kasus

<b>I. Penculikan</b>	
Jumlah kasus penculikan	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
<b>J. Kejahatan seksual</b>	
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat	0 kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	0 unit
<b>K. Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	
Jumlah gelandangan	0 orang
Jumlah pengemis jalanan	0 orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar	0 orang
Jumlah manusia lanjut usia terlantar	0 orang
Jumlah orang gila/stress/cacat mental	27 orang
Jumlah orang cacat fisik	41 orang
Jumlah orang kelainan kulit	1 orang
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	0 orang
Jumlah rumah dan kawasan kumuh	14 unit
Jumlah panti jompo	0 unit
Jumlah panti asuhan anak	0 unit
Jumlah rumah singgah anak jalanan	0 unit
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	0 orang
Jumlah penghuni bantaran sungai	98 orang
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api	0 orang
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	0 orang
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	0 orang
Jumlah anak yatim usia 0-18 tahun	87 orang
Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun	76 orang
Jumlah anak yatim piatu 0-18 tahun	67 orang
Jumlah janda	121 orang
Jumlah duda	112 orang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	0 orang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/ sederajat	31 orang
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/ sederajat	23 orang
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/ sederajat	54 orang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	127 orang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	221 orang
Jumlah penduduk eks NAPI	67 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir	87 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah	34 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan	45 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan	23 orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan	21 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih	32 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus	2 orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh	56 orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk	0 orang
Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman	0 orang
<b>L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b>	
Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya	0 kasus
<b>M. Teror dan Intimidasi</b>	

Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk	0 kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat	0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal	0 kasus

#### N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta

Organisasi Siskamling	Ada
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat	Ada
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda	0 RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas	4 orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda	Ada
Buku anggota Hansip dan Linmas	2 jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta	0 unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah	4 kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan	1 Pos

#### XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT

##### A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara

Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	2 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	2 kegiatan
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	3 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	2 kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	2 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	2 kegiatan
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri	0 kasus
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi	0 orang
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi	0 orang
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga	0 kasus
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan	0 kasus
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara	0 kasus
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini	0 kasus
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.	0 kasus
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya	0 kasus
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain	0 kasus

##### B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi

Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan	1 jenis
Jumlah Wajib Pajak	1245 orang
Target PBB	Rp 72.000.000,00
Realisasi PBB	19.000.000,00 %
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB	5 tindakan
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan	5 jenis
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	1245 orang
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	Rp 35.000.000,00
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	26,00 %
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan	1 jenis
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan	Rp 72.000.000,00
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan	1,00 %
Jumlah kasus pungutan liar	1 kasus
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar	1 kasus

<b>C. Partisipasi Politik</b>	
<b>1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum</b>	
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih	1918 orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu	1765 orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik	21 orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini	1 partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini	3 partai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan	21 orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu	1 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil	1918 pemilih
<b>2. Pemilihan Kepala Daerah</b>	
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	1975 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu	1975 pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu	1975 pemilih
<b>3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan</b>	
Penentuan Jabatan Kepala Desa	Dipilih masyarakat secara langsung
Penentuan Sekretaris Desa	Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun	Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta dilaporkan ke Camat
Masa jabatan Kepala Desa	6 tahun
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan	
<b>4. Pemilihan BPD</b>	
Jumlah anggota BPD	5 orang
Penentuan anggota BPD	Dipilih masyarakat secara langsung
Pimpinan BPD	Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Ada
Anggaran untuk BPD	Ada
Produk keputusan BPD tahun ini	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Desa 10 buah</li> <li>2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 172 kali</li> <li>3. Rancangan Peraturan Desa. 2 buah</li> <li>4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 12 kali</li> <li>5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 10 kali</li> <li>6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 112 kali</li> <li>7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 2 kali</li> </ol>
<b>5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan</b>	
Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Ada
Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD	Perdes
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	10 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	Belum diatur
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan	3 unit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah
Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK	Aktif

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK	5 kegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	Aktif
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	7 kegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	Ada
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya	Ada
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	Ada
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD	Memadai
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK	5,00 %
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK	Ada dan terisi
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK	Berfungsi

### C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

#### 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan

Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	15 kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan	70,00 %
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan	45,00 %
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan	25,00 %
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan	3,00 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif	Ya
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan	Ya
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif	Ya
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	21,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAB-Desa	5,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	6,00 %
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel	5 kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)	Ada
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	Ada
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan	Ada
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	15 . kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang	16 . kegiatan

#### 2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang	80,00 %
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota	98,00 %
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa	70 kegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah	45 kegiatan
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang	70,00 %
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	15,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan	15,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat	27,00 %
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada	Ada
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.	Ada
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah	0 kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan	11 Jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan	6 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota	13 kegiatan

Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi	14 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN	17 kegiatan
<b>3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk</b>	
Jumlah kelompok arisan	13 buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	146 orang
Ada tidaknya dana sehat	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya	Ada
<b>4. Adat Istiadat</b>	
Adat istiadat dalam perkawinan	Aktif
Adat istiadat dalam kelahiran anak	Aktif
Adat istiadat dalam upacara kematian	Tidak
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	Tidak
Adat istiadat dalam tanah pertanian	Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	Pernah Ada
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	Tidak
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	Aktif
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Tidak
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar	Tidak
<b>5. Sikap Dan Mental Masyarakat</b>	
Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan	0 jenis
Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar	0 jenis
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah	1
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah	1
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal	0
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga	0 jenis
Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga	0 jenis
Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga	0 jenis
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.	0 kasus
Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan	0
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan	0
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat	0
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri	1
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain	0
<b>Etos Kerja Penduduk</b>	
Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas	1
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi	0
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan	0
Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan	1
Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain	0
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain	0
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota	1
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya	0
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak	2

Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan	0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen	1
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	1
Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah	1
Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan	0
Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan	1
Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya	0
Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat	2
<b>XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>	
<b>A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN</b>	
Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	Tidak
Jumlah kegiatan	Jenis
<b>B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>	
<b>1. Rukun Warga (RW)</b>	<b>Tidak</b>
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	0
Jumlah kegiatan	0 Jenis
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan	
Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	
<b>XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN</b>	
<b>A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan</b>	
Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini	Rp 1.825.376.007,00
Sumber Anggaran	
APBD Kabupaten/Kota	Rp 866.364.000,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp 0,00
Pendapatan Asli Desa	Rp 17.500.000,00
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 0,00
Alokasi Dana Desa	Rp 761.510.000,00
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan	Rp 180.000.000,00
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat	Rp 2.007,00
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan	Rp 1.270.069.203,00
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai	Rp 351.600.000,00
<b>B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah</b>	
Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD	1
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat	0 jenis
Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa	1
Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota	1
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat	0 jenis
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah	0 kasus
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah	0 kasus
<b>C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	
<b>1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN</b>	
Gedung Kantor	Ada - Baik
Jumlah ruang kerja	10 Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	Ada
Listrik	Ada
Air bersih	Ada
Telepon	Ada

<b>1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor</b>	
Jumlah mesin tik	2 buah
Jumlah meja	16 buah
Jumlah kursi	16 buah
Jumlah almari arsip	3 buah
Komputer	7 unit
Mesin fax	1 unit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa	8 unit
<b>1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	
Buku Data Peraturan Desa	Ada dan Terisi
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	Ada dan Terisi
Buku Administrasi Kependudukan	Ada dan Terisi
Buku Data Inventaris	Ada dan Terisi
Buku Data Aparat	Ada dan Terisi
Buku Data Tanah Kas Desa	Ada dan Terisi
Buku Administrasi Pajak dan Retribusi	Ada dan Terisi
Buku Data Tanah	Tidak Ada
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	Ada dan Terisi
Buku Agenda Ekspedisi	Ada dan Terisi
Buku Profil Desa dan Kelurahan	Ada dan Terisi
Buku Data Induk Penduduk	Ada dan Terisi
Buku Data Mutasi Penduduk	Ada dan Terisi
Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan	Ada dan Terisi
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	Ada dan Terisi
Buku Data Penduduk Sementara	Ada dan Terisi
Buku Anggaran Penerimaan	Ada dan Terisi
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan	Ada dan Terisi
Buku Kas Umum	Ada dan Terisi
Buku Kas Pembantu Penerimaan	Ada dan Terisi
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan	Ada dan Terisi
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	Ada dan Terisi
<b>2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD</b>	
Gedung Kantor	
Jumlah ruang kerja	Ruang
Balai BPD	-
Listrik	
Air bersih	
Telepon	
<b>2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor</b>	
Jumlah mesin tik	buah
Jumlah meja	buah
Jumlah kursi	buah
Jumlah almari arsip	buah
Komputer	unit
Mesin fax	unit
<b>2.B. Administrasi BPD</b>	
Buku-buku administrasi kegiatan BPD	
Buku Buku Administrasi Keanggotaan	
Buku kegiatan BPD	
Buku himpunan peraturan desa	
Buku Lainnya	
<b>3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN</b>	
Gedung kantor atau Balai Pertemuan	
Alat tulis kantor	
Barang inventaris	Jenis
Buku administrasi	Jenis
Jenis kegiatan	Jenis
Jumlah pengurus	Orang
Jumlah ruang kerja	Ruang

<b>D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	
<b>1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	
Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan	Ada
Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan	Ada
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	Ada
Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD	Ada
Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing	Ada
Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	17 kegiatan
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	13 kegiatan
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	12 kegiatan
Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN	21 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	19 kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	1 kali
<b>2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan	1
Pedoman bantuan keuangan dari provinsi	1
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	1
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	1
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi	13 kegiatan
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	12 jenis
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	18 jenis
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	14 jenis
Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	11 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	12 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	0 jenis
<b>3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	
Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa	0 jenis
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	0 jenis
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa	11 jenis
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.	10 jenis
Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	11 jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	6 jenis
Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa	0 jenis
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	0 jenis
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota	6 jenis
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan	0 jenis
Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD	21 jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	12 jenis
Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	16 jenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan	0 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	11 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 kasus
Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah	8 kasus

<b>4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan</b>	
Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	2 kali
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan	2 kali
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan	3 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa	1 kali
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan	1 kali
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	1 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan	1 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	2 kali
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	1 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.	2 kali
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga	1 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	1 kali
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan	2 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat	2 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya	1 kali
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	2 kali

KAB. PASER, 28 Desember 2022  
 PASIR BELENGKONG  
 Kecamatan Paser Belengkong  
 Kabupaten KAB. PASER

MUHAMMAD SUBHAN, SE.,MH  
 Kepala Desa

Tembusan :  
 1. Camat Paser Belengkong  
 2. Bupati KAB. PASER  
 3. Arsip